

Strategic Culture Cult of Defense: Dominant Culture in China's Salami Slicing Geopolitical Strategy

Budaya Strategis Cult of Defense: Budaya Dominan dalam Strategi Geopolitik Salami Slicing Cina

Nyoman Sekar Ayu Paramesvari

Universitas Airlangga

Abstrak:

Cina terus berupaya mendirikan norma-norma dalam dinamika internasional, terutama di Asia, dengan strategi "salami slicing" untuk memperluas pengaruhnya tanpa memicu konflik besar. Strategi ini terlihat dalam bagaimana Cina menyikapi dua sengketa wilayahnya; okupasi pulau-pulau di Laut Cina Selatan dan perbatasan India. Strategi Salami slicing membantu Cina secara bertahap menduduki wilayah-wilayah yang diperebutkan dan menawarkan fait accompli yang harus diterima oleh pihak lain. Tulisan ini lalu akan menggunakan kerangka budaya strategis Bloomfield yang mengedepankan adanya subkultur dominan dan subordinat. Penulis menemukan bahwa dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan Cina dalam sengketa wilayah, budaya strategis yang dominan merupakan Cult of Defense sejalan dengan argumen Scobell. Budaya strategis ini memiliki tiga (3) implikasi pada kebijakan, yaitu memproyeksi kekuatan apabila diujung krisis, kecenderungan dalam mengambil resiko, serta dalam garis besar tindakannya, Cina lalu akan memberikan justifikasi atas penggunaan kekuatannya.

Kata-Kata Kunci: Cina, Salami Slicing, pendudukan wilayah, India, cult of defence

Abstract:

China continues to try to establish norms in international dynamics, especially in Asia, with a "salami-slicing" strategy to expand its influence without triggering major conflicts. This strategy is seen in how China responds to its two territorial disputes; the occupation of islands in the South China Sea and the Indian border. The salami-slicing strategy helps China gradually occupy disputed territories and offers a fait accompli that the other party must accept. This paper will then use Bloomfield's strategic culture framework which emphasizes the existence of dominant and subordinate subcultures. The author finds that in influencing China's policies in territorial disputes, the dominant strategic culture is the Cult of Defense coined by Scobell. This strategic culture has three (3) implications for policy, namely projecting strength when on the verge of crisis and the tendency to take risks. In the outline of its actions, China will justify using its power.

Keywords: China, Salami Slicing, occupation, India, cult of defence.

Pendahuluan

Tulisan ini akan menggunakan kerangka Bloomfield sebagai pisau analisis untuk menelisik strategi *salami slicing* Cina dalam menghadapi dua (2) isu sengketa wilayah, yaitu Laut Cina Selatan dan Perbatasan India - Cina. Chatterji (2020) mengartikan *salami slicing* sebagai akumulasi perlahan dari tindakan-tindakan kecil-dimana tindakan kecil tersebut tidak akan memicu perang. Sedikit demi sedikit, perubahan tersebut akan menghasilkan perubahan substansial dalam gambaran strategis. Haddick (2014) melihat intensi Cina untuk mencapai tiga tujuan, yaitu (1) Menciptakan kesan legitimasi tunggal dengan keunggulan militer yang dimilikinya-dengan harapan tujuan akhir yaitu kedaulatan atas sengketa tersebut, (2) Penetapan indikator baru atas otoritas negara, yang mencakup patroli terus menerus oleh penegak paramiliter dan kapal-kapal Angkatan Laut, pendirian pangkalan militer, dan pendirian kantor wilayah, dan (3) Meningkatkan legitimasi klaim dengan memberikan ancaman langsung seperti pembenturan dengan kapal Amerika Serikat-USS Cowpens-yang diharapkan akan menurunkan kehadiran Amerika Serikat dan sekutunya.

Baik Laut Cina Selatan ataupun perbatasan India memiliki signifikansi penting bagi Cina. Pengokupasian atas Laut Cina Selatan akan memberikan mereka kekuatan baik secara politis maupun ekonomi. Tentu, salah satunya terletak pada fakta bahwa Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan yang penting bagi banyak negara. Gray (2021) menjelaskan bahwa perekonomian Cina bergantung pada perdagangan internasional seperti minyak dan barang konsumsi yang mencakup 2/3 perdagangan maritim Cina, dan 80% impor minyak Cina melewati Laut Cina Selatan. Terlepas dari pentingnya perdagangan, sumber daya alam di Laut Cina Selatan juga penting penting bagi masa kini dan masa depan Cina. Sebagai *rising power*, ia tentu ingin memanfaatkan minyak dan mineral yang merupakan sumber daya berpotensi di bawah laut. Kendati demikian, kepentingannya baik di bawah perairan dan di atas perairan menjadi alasan mengapa Cina menginginkan kendali mutlak atas wilayah tersebut, bagaimanapun caranya.

Dalam konteks *Line of Control* (LAC) di perbatasan India, akar permasalahannya terletak pada perbatasan yang disengketakan sepanjang 3.440 km. Sungai, danau, dan tumpukan salju di sepanjang perbatasan membuat garis tersebut dapat bergeser, sehingga membuat tentara saling berhadapan di banyak titik, sehingga memicu konfrontasi (BBC, 2020). Istilah LAC tersebut digunakan

oleh Perdana Menteri Cina Zhou Enlai dalam sebuah catatan tahun 1959 kepada Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Perbatasan tersebut hanya ada sebagai garis gencatan senjata informal antara India dan Cina setelah Perang Cina-India tahun 1962. Pada tahun 1993, India dan Cina sepakat untuk menghormati LAC dalam perjanjian bilateral, tanpa membatasi garis itu sendiri. Namun tentu, dengan logika *security dilemma*, Cina mengikuti karakteristik untuk mempertahankan perbatasannya dari ancaman-ancaman eksternal, sehingga ia berupaya untuk menyelesaikannya sendiri, seperti dalam bentrok pada tahun 2020. Penguasaan Cina atas kaki pegunungan tersebut akan memberikan Cina kemampuan militer untuk mengamati pergerakan India.

Melalui strategi *salami slicing*, Cina telah mengamankan Tibet, Xinjiang, Siberia dan Mongolia. Dalam konteks Laut Cina Selatan, *Mischief reef*, *Johnson reef*, *Scarborough Shoal*, dan wilayah Maritim lainnya yang dimiliki oleh Filipina, Vietnam, dan Jepang telah diklaim oleh Cina. Pandya (2022) menjelaskan bahwasanya tindakan mengikis secara lambat dan bertahap tersebut membuat pesaingnya gelisah. Namun, tidak cukup untuk meningkatkan konflik menjadi perang besar-besaran ataupun intervensi militer dari negara lainnya. Konflik ini seringkali dianggapnya sebagai sengketa wilayah kecil mengenai hak atas tanah atau penangkapan ikan. Rancangan akuisisi dan kontrol teritorial dapat disembunyikan dengan mudah oleh Cina tanpa menimbulkan kecurigaan. Setiap tindakan tersebut, Cina dengan cerdas akhirnya memperoleh lebih banyak wilayah musuh. Perilaku agresif tersebut akan dianalisis melalui kacamata Bloomfield, dengan mempertimbangkan budaya strategis yang mendominasi dan mencerminkan tindakan-tindakan tersebut. Mengingat bahwasanya dalam suatu negara, dalam konteks ini Cina tidak memiliki hanya satu subkultur budaya strategis. Oleh karena itu, tulisan ini fokus menjawab subkultur budaya strategis dominan mana yang memengaruhi strategi *salami slicing* dalam budaya Cina.

Kerangka Berpikir Budaya Strategis

Apabila ditelusuri kembali, budaya strategis secara tersirat telah disinggung oleh Sun Tzu dan Thucydides yang menekankan pentingnya kultur dan keterkaitannya dengan strategi dengan cara mereka sendiri. Bahkan, Lantis (2002) menyoroti bahwa pada 600 SM, kekaisaran Byzantium telah menyusun buku strategi yang mengumpulkan karakteristik dan taktik dari peradaban musuh. Terminologi budaya strategis lalu dicanangkan oleh Jack Snyder pada tahun 1977, di mana ia mengeksplorasi perbedaan respons Soviet dengan

ekspektasi Amerika Serikat dalam menanggapi strategi *Limited Nuclear Operation* Amerika Serikat. Snyder (1977) lalu menjelaskan budaya strategis sebagai seperangkat ide, respon emosional dan juga pola perilaku yang berkorelasi dengan strategi. Terminologi budaya strategis dikoinkan oleh Jack Snyder pada periode nuklir lalu dikatakan sebagai generasi pertama.

Johnston (1995) mengklasifikasi pembagian periodisasi sebagai berikut; (1) Generasi pertama yang berkembang pada pertengahan 1980an, dengan Snyder (1977) yang meletakkan dasar untuk budaya strategis dan dilanjutkan oleh Gray (1984), yang menjelaskan bahwa sejarah, budaya politik, dan geografi negara turut berpengaruh pada strategi yang digunakan oleh suatu negara. Kedua penjelasan tersebut lalu menekankan adanya implikasi pemikiran strategi yang mengakar dari negara akan konsisten dengan suatu bentuk perilaku. (2) Generasi kedua lalu dipelopori oleh Klein (1991) dengan menjelaskan bahwa budaya strategis diyakini sebagai sikap yang menurun dalam lembaga militer mengenai tujuan politik dari perang, tanpa mengesampingkan andil pemimpin dalam pengambilan keputusan. Pemimpin, dengan gabungan nilai dan kepercayaan yang dimiliki dapat mempengaruhi pandangannya terhadap perang ataupun penggunaan kekuatan (3) Aliran generasi ketiga lalu memberikan pengertian budaya strategis yang lebih eklektik, dengan Johnston (1995) yang menekankan 'simbol' yang erat kaitannya dengan budaya berpikir bangsa, yang dapat mempengaruhi penetapan preferensi strategis yang bersifat luas dan berjangka panjang. Ia lalu menambahkan bahwa diperlukan adanya pemahaman mendalam terhadap sejarah suatu negara dalam analisis budaya strategis. Johnston juga menambahkan bahwasanya budaya strategis tidak hanya dapat diaplikasikan pada konteks militer, tetapi juga bisa pada keamanan negara, kebijakan luar negeri, ancaman dan juga penggunaan kekuatan.

Dengan periodisasi tersebut, persamaan pemahaman budaya strategis para pakar hanya terbatas dalam melawan dominasi realis, materialis dan universalis dalam teori HI (Bloomfield, 2012). Konseptualisasi mengenai budaya strategis terus berlanjut, salah satunya dengan perdebatan Johnston dan Gray, salah satu perdebatan debat yang paling menonjol dan paling terpolarisasi dalam literatur budaya strategis. Kendati demikian, Bloomfield (2012) lalu mengusulkan sebuah model yang memperlakukan budaya strategis sebagai entitas tunggal yang mengandung berbagai subkultur strategis yang berisi elemen-elemen kontradiktif, ataupun berbagai aliran atau tradisi. Dengan menyadari bahwa budaya strategi suatu negara berisi berbagai 'skema strategi

kognitif' atau subkultur yang hidup berdampingan dan bersaing, permasalahan kontinuitas dan koherensi berlebih tersebut dapat diselesaikan. Asumsi dapat dimulai dengan subkultur yang hadir dalam relasi dominasi yang dapat berubah. Apabila negara telah memiliki budaya strategis dengan waktu yang lama, maka asumsinya akan berdasar pada bahwa subkultur tersebut sedang dominan – yang akhirnya membantu mengarahkan persepsi pengambil kebijakan. Namun, ada kemungkinan bahwa terdapat subkultur lain, yang pengaruhnya terbatas – hanya dipegang oleh kelompok minoritas yang kecil dan terpinggirkan, yang mungkin suatu saat akan menjadi subkultur yang dominan dan merubah kebijakan strategis negara tersebut.

Kerangka budaya strategis yang diajukan Bloomfield (2012) dianggap seperti 'paket' informasi mengenai situasi strategis suatu negara. Yang mana, bagian terdalamnya melibatkan bagian paling berkaitan dengan budaya dari pengambilan keputusan – seperti persepsi teman atau musuh – di mana mereka memilih negara mana yang mereka pilih untuk percaya ataupun takut, atau bahkan negara yang mereka abaikan. Dengan persepsi tersebut, tahapan pertama dalam meneliti budaya strategis akan berfokus pada bagian kultur atau identitas, dengan menelisik kesamaan atau perbedaan yang dimiliki oleh negara-negara. Budaya tersebut akan memerlukan pertimbangan dari literatur mengenai strategi negara, yang akan lebih lanjut mendalami detail-detail historis negara. Hal ini tidak semerta-merta membuat sub kultur strategis tidak terbatas, atau hanya ditentukan oleh perubahan lingkungan strategis eksternal suatu negara. Identitas negara, memberikan batasan terhadap serangkaian pilihan strategis suatu negara.

Cult of Defense di antara Sengketa Wilayah Laut Cina Selatan dan Perbatasan Cina – India

Budaya Strategis Cina

Suatu negara serta masyarakatnya dapat bersama-sama memahami ancaman dari aktor lain dengan keyakinan kolektif. Kendati demikian, budaya strategis akan menentukan bagaimana mereka menjalankan keputusan mengenai aspek pertahanan dan keamanan, serta bagaimana aksi tersebut akan berdampak terhadap negara lain selama situasi perang atau damai. Hal ini lalu tercerminkan melalui peradaban Cina, sebuah peradaban yang telah berdiri kokoh sejak 221 SM dengan nilai dan budaya yang sudah mengakar. Alih-alih memiliki budaya strategis yang tunggal, Cina memiliki lebih dari satu budaya

strategis. Apabila ditelusuri kembali, budaya strategis yang menonjol pada abad tersebut salah satunya adalah Confucian-Mencian, yang menekankan bagaimana pengambil keputusan Cina enggan untuk agresif, sehingga hanya berpatok pada pertahanan diri dengan cara non-kekerasan. Sebaliknya, Parabellum-Realpolitik justru lebih condong pada penggunaan kekuatan dalam permasalahan keamanan (Johnston, 1995; Wang, 2011; Jonghyuk, 2023).

Untuk memahami akar nilai-nilai strategis Cina, diperlukan perincian sejarah kebudayaannya. Selama 200 tahun sejak Qin Shihuang mempersatukan Cina, negara tersebut selalu melindungi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang terbentuk. Perbatasan ini mencakup Mongolia, Xinjiang, Tibet, Laut Cina Selatan, Korea Utara, dan daratan Asia Tenggara (Zhang, 2010). Konfusianisme dan Legalisme lalu muncul sebagai ajaran dominan bersamaan dengan ajaran militer legendaris, yaitu *The Art of War* oleh Sun Tzu. Setelah Dinasti Han, Konfusianisme menjadi filosofi negara yang paling mendominasi dalam institusi serta kerangka spiritual Cina (Feng, 2007).

Dalam konteks kenegaraan pun, konfusianisme dicerminkan melalui kebijakan-kebijakan diplomatiknya. *He-Qin*, atau kedamaian melalui pernikahan merupakan bentuk diplomatik antara Han dan tetangganya. Bahkan, Ding et al (2021) mencatat bahwa telah ada 10 pernikahan yang berhasil dari hubungan diplomatik tersebut. Pernikahan tersebut akhirnya membantu menjaga hubungan yang damai dan saling bermanfaat bagi kedua pihak. Xiongnu memiliki prajurit yang cerdas di pertempuran, sementara Han merupakan negara yang cukup lemah dalam konteks pertahanan-keamanan. Banyak catatan sejarah mengungkapkan fakta bahwa *He-Qin* menyediakan bentuk baru hubungan kekaisaran antara Han dan orang asing, di mana kekaisaran dapat terus terlibat dengan Xiongnu tanpa invasi kekerasan langsung.

Selain pernikahan antarnegara, Cina juga seringkali memberikan kado diplomatik sebagai bentuk rasa loyalitas. Hadiah pada Dinasti Qing sendiri bersifat praktis, seperti harta karun emas dan perak, sutra rempah, dan satin. Tidak hanya terbatas pada barang, Dinasti Qing juga memberikan hadiah berupa hewan langka, salah satunya merupakan kuda (Xia, 2022). Pakaian tradisional Dinasti Qing kala itu juga pernah dihadiahkan kepada 2500 perwira dan prajurit Inggris selama kunjungan Misi Magani ke Beijing. Berbagai metode diplomatik tersebut dilakukan oleh Cina, sebagai bentuk preventif atas konflik. Konfusianisme beranggapan bahwa penggunaan kekuatan merupakan opsi

terakhir dalam menghadapi konflik, mengingat bahwasanya metode-metode tersebut jauh lebih murah daripada menggunakan kekuatan militer.

Identitas bersama Cina tercerminkan melalui pandangan "Zhongguo" atau Cina sebagai pusat peradaban yang kala itu menjadi identitas bersama Cina, telah ada sejak periode *Spring and Autumn* dan *Warring States*. Pandangan ini menghubungkan berbagai negara, meskipun hanya mencakup bagian utara Sungai Kuning dengan Luoyang sebagai pusatnya. Mayoritas *heartland* atau pusat Cina adalah etnis Han yang memiliki kultur homogen, dengan satu bahasa tertulis sebagai ikatan budaya. Identitas dan ideologi Konfusianisme ini menjadi dasar bagi Cina dalam membangun dan menjaga hubungan hirarkis antara pusat dan *periphery*.

Periode *Warring States* menjadi titik balik dalam evolusi perang, memperkenalkan komposisi militer baru dan metode berperang yang ritualistik tetapi memberikan penderitaan besar bagi masyarakat. Ajaran militer seperti *The Art of War* Sun Tzu dan *a hundred schools of thought* berkembang untuk meningkatkan strategi perang dan cara menjalankan pemerintahan, khususnya cara non-kekerasan. Zhang (2010) menjelaskan bahwa terdapat peristiwa unik yang terjadi, yaitu pendukung aliran filosofi yang berbeda dalam *a hundred schools of thought* berupaya untuk menjual ide mereka tentang reformasi negara pada para penguasa. Para pakar dan karya-karya mereka menyediakan landasan filosofis dari filsafat pemerintahan negara Cina dan pemikiran militer.

Konfusianisme, yang menjadi filosofi fundamental Cina, telah membentuk budaya strategis yang menekankan harmoni, kebajikan, dan cara non-kekerasan dalam mencapai tujuan politik dan militer (Feng, 2007; Zhang, 2010). Prinsip ini menyarankan bahwa kekerasan hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan bersifat defensif, serta bertujuan untuk mengembalikan status awal (Wang, 2011). Sebaliknya, ada budaya militer agresif yang dikenal sebagai *Cultural Realism* atau *parabellum*, yang berakar dari teks militer *Seven Military Classics* abad ke-11. Johnston (1995) mengkategorikan budaya strategis Cina menjadi simbolik Konfusianisme dan operasional realpolitik, di mana realpolitik seringkali mendominasi kebijakan Cina. Namun, Bloomfield (2012) mengkritik pendekatan Johnston, dengan menekankan pengaruh ideologi Marxist-Leninist selama periode Mao Zedong sebagai titik balik penting. Wang (2011) juga menyatakan bahwa ajaran realpolitik dari *Seven Military Classics* tidak sepenuhnya diinternalisasi dalam pendidikan militer Cina kuno, yang lebih menekankan keterampilan praktis daripada pemahaman teks militer.

Budaya strategis Cina memiliki banyak sisi dan tidak bisa disederhanakan menjadi satu tradisi monolitik. Tradisi konfusian dan *realpolitik* yang berdampingan ini menghasilkan budaya strategis yang khas, yaitu *The Chinese Cult of Defense*. Scobell (2002) mengajukan budaya ini akibat banyaknya paradoks, bahwa pemikir strategis Cina percaya bahwa budaya strategis Cina bersifat pasifis, defensif dan ekspansionis. Namun, itu memberikan sebuah kebingungan, karena setiap aksi militer lalu dilihat sebagai sesuatu yang defensif, bahkan ketika bersifat ofensif. *Cult of Defense* juga mengasumsikan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional Cina sangat nyata, serta ancaman domestik sama-sama berbahaya dengan ancaman asing. Konsep *Cult of Defense* menggambarkan bagaimana Cina memosisikan dirinya sebagai negara yang damai dan defensif, tetapi tetap siap untuk menggunakan kekuatan militernya untuk mempertahankan diri dan kepentingan nasionalnya.

Scobell (2002) menjelaskan bahwa Cina menganggap dirinya memiliki budaya strategis yang sangat pasifis. Cina, adalah negara yang mencintai perdamaian dan telah memiliki sejarah panjang tradisi yang damai. Namun, Cina tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan militer ketika menghadapi ancaman serius. Ini menunjukkan predisposisi untuk menggunakan kekuatan dalam situasi krisis. Scobell (2002) berpendapat bahwa Cina lebih memilih solusi damai terlebih dahulu, tetapi mereka siap menggunakan kekuatan apabila diperlukan dengan pendekatan *use force sparingly; repeat as often as needed*. Tindakan militer tetap dibatasi oleh skala, area dan waktu penggunaan untuk memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan tujuan strategis. Penggunaan kekuatan oleh Cina sering kali dibenarkan dalam konteks gambaran besar atau situasi keseluruhan. Mereka mengklaim bahwa tindakan militer mereka diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, bahkan jika tindakan tersebut melibatkan serangan ofensif yang mereka sebut sebagai defensif.

Salah satu kesalahan paling terlihat mengenai budaya strategis adalah pakar seringkali membatasi diri dalam analisis dampak budaya strategis untuk menjelaskan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku kebijakan keamanannya. Scobell (2014) menyebutkan bahwa dengan pendekatan tersebut, pakar tidak akan mendapatkan gambaran besar dalam melihat dampak budaya strategis. Diperlukan adanya riset juga dalam gambaran budaya strategis yang dicerminkan oleh persepsi elit politik suatu negara mengenai musuh tertentu. Scobell (2014) lalu memberikan pendekatan baru dalam budaya strategis, yaitu

self perception dan juga *perception to others*. Dalam persepsi diri, Cina cenderung melihat tradisi strategis mereka sebagai tradisi defensif, seperti dalam konsep *Great Wall*. Mereka percaya bahwa kebijakan mereka adalah kebijakan 'pertahanan aktif' yang hanya bertindak jika diserang terlebih dahulu dan mengutamakan solusi damai. Namun, pada realitanya Cina seringkali berindak ofensif dan agresif. Pertahanan aktif juga digunakan yang mencakup berbagai tindakan militer, termasuk serangan *pre-emptive*, yaitu serangan yang dilakukan bahkan sebelum ancaman nyata terjadi. Serangan tersebut dapat berbentuk berbagai percobaan misil ke titik-titik strategis. Salah satunya terlihat dari percobaan *Intercontinental Ballistic Missile*, yang diluncurkan ke Samudra Pasifik pada akhir September 2024 (Davidson, 2024). Ketegangan yang dimunculkan oleh peluncuran tersebut terasa dalam seantero Indo-Pasifik, dengan analisis yang beranggapan bahwa hal tersebut merupakan cara Cina untuk menunjukkan peningkatan kemampuan nuklir jarak jauhnya secara pesat.

Keepers budaya strategis Cina cukup tersebar dalam berbagai lapisan masyarakat. Dengan *keepers* paling utama terletak pada elit militer seperti pemimpin politik, perwira militer. Scobell (2014) menyoroti pada era reformasi pasca-Mao, kepemimpinan Partai Komunis Cina (CCP) merehabilitasi resmi konfusius dan kebangkitan konfusianisme. CCP lalu menggunakan propaganda yang menjelaskan bahwa CCP adalah pewaris yang sah dari berbagai dinasti besar Cina dengan legitimasi mereka yang sempat menurun. Para pejabat partai secara teratur mengemas retorika mereka dalam nilai-nilai Konfusius. Selain itu, *keepers* juga tersebar melalui pemikir strategis di perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Lembaga ini tercerminkan dari institut konfusius yang disebar di seluruh penjuru dunia yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Cina. Kuil-kuil Konfusius direnovasi serta kelas-kelas tentang Konfusianisme yang ramai diadakan.

Dominasi Subkultur Budaya Strategis *Cult of Defense*

Kebijakan strategi *salami slicing* Cina didominasi oleh subkultur budaya strategis *Cult of Defense*. Scobell (2014) mengidentifikasi adanya enam prinsip yang mempengaruhi pengambilan keputusan elit Cina melalui kerangka *Cult of Defense*, yaitu mengutamakan unifikasi nasional, meningkatnya persepsi ancaman, konsep pertahanan aktif, *teori Just War Cina*, fobia atas kekacauan domestik dan mengutamakan kesejahteraan seluruh masyarakat dibandingkan kesejahteraan individu. Prinsip-prinsip tersebut lalu ditranslasikan oleh Cina

menjadi satu kesatuan kebijakan. Kebijakan tersebut, lalu dibangun dengan tiga landasan utama, yaitu (1) *a predisposition to resort to force in a crisis*, (2) *a marked tendency to risk taking*, dan (3) *justifying the use of force in a bigger picture*. Ketiga landasan ini lalu akan lebih lanjut dijadikan basis analisa untuk kebijakan, keputusan, maupun perkataan Cina baik tertulis atau verbal.

A Predisposition to Resort to Force in a Crisis

Di bawah pengaruh budaya strategis *Cult of Defence*, para pemimpin sipil dan militer Cina menganggap bahwa penggunaan kekuatan militer mereka sangat terbatas. Mereka sangat yakin bahwa Cina hanya menggunakan kekuatan militer dengan keengganan yang besar dan frekuensi yang jauh lebih sedikit dibandingkan para pemimpin di negara-negara lain di seluruh dunia. Pemikiran elit Cina mengenai penggunaan kekerasan dapat diringkas dalam kalimat berikut: *'Use force sparingly; repeat as often as needed'* (Scobell, 2014).

Hal ini tercerminkan dari baik pengokupasian yang perlahan tapi pasti Cina baik dalam Laut Cina Selatan dan LAC. Sejak tahun 2014, Cina telah membangun tujuh pulau buatan yang berfungsi sebagai pangkalan militer untuk mendukung pelabuhan, landasan udara, dan radar fasilitas, pabrik desalinisasi dan lebih dari 1000 bangunan (Corr, 2018). Winston & Sachdeva (2020) menambahkan bahwa Cina telah memulai proyek reklamasi laut besar-besaran di *Cuarteron, Fiery Cross, Gaven, Hughes, Johnson, Mischief, dan Subi Reefs*. Pada tahun 2020 terdapat tiga pulau paling berkembang di Spratly: *Fiery Cross, Mischief, dan Subi Reefs*, semuanya memiliki infrastruktur militer yang luas termasuk landasan pacu, gedung, pelabuhan, kubah radar, dan silo rudal. Sebagai strategi salami, pulau-pulau yang perlahan-lahan dibuat ini turut memungkinkan kapal-kapal dan objek militer lainnya untuk berkumpul dengan jumlah banyak di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara lain yang jauh dari daratan Cina, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Indonesia.

Cina tidak sedikitpun lengah dengan segala kekacauan serta pembangunan yang masif di Laut Cina Selatan. Di sisi barat, PLA daratan telah mengambil keuntungan atas kesenjangan kekuatan yang terjadi antara India dan Cina. Sebagaimana strategi *salami slicing* bekerja, sudah bukan kejutan lagi bahwa Cina mampu mengakuisisi akses pos pengintaian India. Bahkan, India telah kehilangan akses terhadap 26 dari 65 pos, yang secara tersirat India telah secara *de facto* menyerahkan wilayah tersebut kepada Cina. Pada tanggal 1 April, Kementerian Sipil Cina merilis daftar terbaru atas nama geografis standar untuk 11 tempat di Arunachal Pradesh. Daftar tersebut berisi nama-nama dalam

karakter Cina dan Tibet, dan dalam *pinyin*, yang disebut oleh surat kabar Global Times milik CCP sebagai “langkah yang sah dan hak kedaulatan Cina.” Arunachal Pradesh – “Tibet Selatan” bagi CCP – “telah menjadi wilayah Cina sejak zaman kuno,” lanjut surat itu. Ini bukan pertama kalinya Cina mencoba memajukan klaim teritorialnya dengan mengganti nama daerah (Tirziu, 2023). Daftar serupa mengenai Arunachal Pradesh dikeluarkan pada tahun 2017 dan 2021, hanya beberapa hari sebelum Undang-Undang Perbatasan Tanah CCP mulai berlaku. Akuisisi berbagai pos ataupun pulau yang terjadi di kedua studi kasus menunjukkan bagaimana hal tersebut dilakukan oleh Cina secara berulang kali.

A Marked Tendency toward Risk-Taking

Selain itu, catatan penggunaan kekuatan oleh komunis Cina sejak tahun 1949 mengungkapkan kebiasaan mengambil risiko yang sudah diperhitungkan. Meskipun para pemimpin Cina tidak menggunakan kekerasan dengan enteng atau tanpa banyak pemikiran, mereka cenderung percaya bahwa risiko yang telah diperhitungkan layak untuk diambil. Mereka tampaknya yakin bahwa Cina dapat memastikan kendali eskalasi dengan membatasi secara ketat skala, wilayah, dan waktu penerapan kekuatannya (Scobell, 2014).

Okupasi Cina pada berbagai pulau-pulau tersebut bertidnak sebagai perpanjangan tangan klaim kedaulatan. Hal ini sudah sejauh di mana Cina pun merasa terancam apabila ada kapal penangkap ikan yang masuk ke teritorialnya. Bahkan, pada tahun 2020 kapal militer Cina menembak dan menenggelamkan kapal penangkap ikan Filipina dan Vietnam yang beroperasi dalam ZEE masing-masing (Winston & Sachdeva). Padahal, sebelumnya pada tahun 2019 Cina telah mengirimkan puluhan kapal penangkap ikan ke wilayah ZEE Indonesia, dekat Pulau Natuna Utara, yang akhirnya lalu ditenggelamkan oleh Indonesia dan membuat ketegangan baru antar kekuatan Asia. Selain itu, Aljazeera (2021) menemukan bahwa pada bulan 2021, Cina mengerahkan sebanyak 200 kapal di dekat kawasan ZEE Filipina, khususnya *Whitsun Reef* dan lalu menolak untuk pergi dari wilayah tersebut. Militer juga digunakan untuk melindungi pengeboran minyak Cina saat menjelajahi dasar laut ZEE negara lain pada tahun 2014. PLA Angkatan Laut juga mengganggu kapal eksplorasi minyak negara-negara lain, yang sedang ada di dalam ZEE mereka sendiri.

Di bagian Barat, ancaman Cina juga mengintai India. Dengan kehadiran Cina yang semakin meningkat di dekat LAC, di mana mereka membangun pangkalan udara, landasan helikopter dan juga bangunan pertahanan udara.

Pembangunan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2017 dan telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Di bagian barat LAC, Cina juga berupaya untuk melakukan investasi dalam pembangunan jalan raya utama yang disebut sebagai G695 yang menghubungkan Tibet dan Xinjiang (Phillip, 2020). Rute tersebut terletak sekita 20-50 km dari LAC dan akan direncanakan selesai pada tahun 2035. Wilayah ini mencakup keseluruhan wilayah Aksai Chin yang disengketakan, melalui Lembah Galwan hingga Danau Pangong Tso, tempat CCP telah meletakkan dasar bagi kehadiran militer yang signifikan dan berjangka panjang.

Sebuah citra satelit yang menaungi wilayah LAC pada Oktober 2022 telah menunjukkan sebuah bangunan markas besar PLA yang diapit oleh parit untuk menyimpan dan mengamankan senjata (Tirziu, 2023). Sebuah radar dome juga dibangun, kemungkinan besar untuk pengumpulan sinyal intelijen atau radar – sedang dibangun di puncak gunung di utara danau. Hanya berjarak 23 kilometer dari sana, Cina bergegas menyelesaikan jembatan yang melintasi Pangong Tso yang akan menghubungkan tepi utara – yang diklaim India sebagai wilayah Ladakh – dengan tepi selatan di Tibet. Jembatan tersebut dapat memfasilitasi pergerakan pasukan dan peralatan PLA. Hal ini juga merupakan cara Cina menciptakan fakta di lapangan untuk memajukan ambisi teritorialnya.

Justifying the Use of Force in Terms of the Big Picture

Prioritas para pemimpin Cina dalam mempertimbangkan penggunaan kekuatan merupakan dampak operasi terhadap situasi keseluruhan. CCP akan menjustifikasi suatu operasi militer apabila dirasa dapat mengulur waktu serta menghalangi musuh untuk melaakukan tindakan agresi di masa depan.. Dengan kata lain, para pemimpin Cina cenderung menyimpulkan bahwa jika Cina tidak menggunakan kekuatan militer, situasinya akan menjadi lebih buruk. Prinsip ini turut membangun budaya strategis *Cult of Defense* yang mendominasi dalam pembentukan citra Cina yang terus menerus membela diri di hadapan masyarakat internasional. Keinginan Cina untuk terus defensif terhadap perilakunya meenjadi informasi bagaimana situsi strategis Cina yang memiliki persepsi ancaman yang tinggi.

Kerangka budaya strategis yang diajukan Bloomfield (2012) dianggap seperti 'paket' informasi mengenai situasi strategis suatu negara. Yang mana, bagian terdalamnya melibatkan bagian paling berkaitan dengan budaya dari pengambilan keputusan – seperti persepsi teman atau musuh – di mana mereka

memilih negara mana yang mereka pilih untuk percaya ataupun takuti, atau bahkan negara yang mereka abaikan

Apabila ditelusuri kembali, CCP sedang mengatasi 'abad penghinaan' yang terjadi setelah pembantaian di Tiananmen Square pada tahun 1989. CCP berupaya untuk memfokuskan diri dalam pendidikan dengan suatu sudut pandang tertentu tentang cara melihat sejarah Cina (Humprey, 2018). Narasi tersebut, juga didukung melalui berbagai propaganda seperti buku pelajaran, museum, hari libur nasional, dan progora televisi. Salah satu dari program televisi tersebut berisi kilas balik pahlawan dalam sejarah Cina, yaitu Laksamana Zheng He yang mengarungi Laut Cina Selatan lebih dari 600 tahun yang lalu. Salah satu narasi tersebut berbunyi:

We learned then that the international world order is unfair. China is not safe and has been invaded many times. The way to protect ourselves is to build a great wall of the sea, and you do that with big ships and strong islands

Hal ini merupakan narasi yang diberikan oleh CCP yang telah diajarkan untuk memahami nilai strategis Laut Cina Selatan dan India. Bahwa, apabila Cina tidak mengumpulkan modalitas yang cukup, Cina dengan mudahnya dapat dihancurkan oleh negara-negara lain yang lebih kuat. Pulau yang kuat ini dapat direfleksikan sebagai negara dan perbatasan yang kuat agar tidak bisa diganggu oleh lawan, sebagaimana yang terjadi di perbatasan India saat ini. Tidak hanya itu, tentu kapal besar merujuk pada bagaimana Cina terus-menerus membangun pangkalan militer di berbagai sudut untuk melindungi dirinya sendiri. Justifikasi tersebut bersifat *inward looking*.

Tidak hanya itu, Cina terus menerus membela diri meskipun telah beberapa kali dimediasikan. Dari motif serta tindakannya sendiri memang mencerminkan bagaimana Cina tidak akan melepaskan Laut Cina Selatan begitu saja. Cina telah mengabaikan UNCLOS, peraturan Internasional, hak-hak dan kebutuhan negara tetangga serta kecaman global, khususnya Amerika Serikat sebagai hegemoni. Pada tahun 2009, Cina menolak semua klaim bahwa Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang melewati dan melanggar kedaulatan negara-negara lain;

China has indisputable sovereignty over the islands in the South China Sea and the adjacent waters, and enjoys sovereign rights and jurisdiction over the relevant waters as well as the seabed and subsoil thereof [map of nine dash line]

Seluruh tindakan dan retorika Cina mengenai berbagai sengketa wilayah merupakan strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa kepentingan Cina dihormati dan ditegakkan sebagai perhatian utama dalam dinamika internasional. Saat kedaulatannya dilanggar, Cina akan mengeluarkan retorika bahwa negara lain telah mengganggu stabilitas, sebagaimana disebutkan oleh China's Embassy (2024) pada 1 April;

The Philippines violated the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) jointly signed by China and ASEAN countries. Article 5 of the DOC stipulates that the Parties undertake to exercise self-restraint in the conduct of activities that would complicate or escalate disputes and affect peace and stability including, among others, refraining from action of inhabiting on the presently uninhabited islands, reefs, shoals, cays, and other features

Hal serupa terjadi dalam sengketa India, di mana Cina menganggap bahwa tindakan Cina mengganggu stabilitas. Juru bicara Kementerian Menteri Luar Negeri Cina pada tahun 2023 memberikan pernyataan bahwa (VoA, 2023);

Zangnan is China's territory, The Indian official's visit to Zangnan violates China's territorial sovereignty and is not conducive to the peace and tranquility of the border situation.

Selama berbagai pernyataan-pernyataan mengenai kasus sengketa wilayah, Cina terus menerus menekankan bahwa negara lain yang masuk ke kedaulatannya telah mengacaukan stabilitas. Sementara, melalui banyak bukti okupasi, Cina sendiri tidak ingin dan tidak mau disebut mengganggu, tetapi lebih menekankan bahwa dia sedang melindungi teritorinya sendiri. Menurut Cina, berbagai operasi yang telah mereka lakukan dapat dijustifikasi dengan alasan mempertahankan diri.

Penutup

Budaya strategis Cina memainkan peran penting dalam pendekatan terhadap sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dan perbatasan Cina-India. Dengan menggunakan strategi salami slicing, Cina secara bertahap mengubah

status quo tanpa memicu konflik besar. Di Laut Cina Selatan, Cina membangun pulau buatan dan memperkuat kehadiran militer, menciptakan perubahan substansial yang mengukuhkan klaim kedaulatan atas wilayah sengketa. Pulau-pulau ini berfungsi sebagai pangkalan militer, mendukung operasi maritim, dan mengawasi aktivitas di wilayah tersebut. Di perbatasan Cina-India, Cina menerapkan strategi serupa dengan mengamankan pos pengintaian dan membangun infrastruktur militer. Penguasaan beberapa pos India dan pembangunan jalan raya memperkuat kehadiran militer Cina, mengubah dinamika kekuatan di wilayah tersebut. Berdasarkan studi kasus yang ada, *Cult of Defense* telah mempengaruhi kebijakan Cina dalam konteks Laut Cina Selatan dan LAC. Sehingga, *Cult of Defense* dapat dikatakan sebagai subkultur yang dominan dan ditranslasikan melalui kebijakan-kebijakan *salami slicing*.

Studi lanjutan dapat mengeksplorasi lebih lanjut mengenai budaya-budaya subordinat yang dapat memengaruhi kebijakan strategis Cina. Budaya yang dapat berdiri sendiri seperti *Cultural Realism* maupun Konfusianisme akan sangat menarik apabila dibahas lebih lanjut, khususnya potensi-potensi apabila salah satu budaya tersebut dapat menggantikan dominasi peran budaya *Cult of Defense* dalam formulasi keputusan maupun pembentukan citra Cina. Tidak berhenti pada kebijakannya, tulisan selanjutnya juga bisa menganalisis bagaimana budaya strategis tersebut berimplikasi pada interaksinya dengan negara lain.

Ucapan Terima Kasih

Dengan segala hormat, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Semoga segala upaya dan dedikasi yang telah diberikan menjadi berkah bagi kami semua.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Al Jazeera. (2021, April 1). US, Philippines discuss Chinese “swarming” in South China Sea. <https://www.aljazeera.com/news/2021/4/1/us-philippines-discuss-chinese-swarming-in-south-china-sea> [Accessed 26 June 2024]
- BBC. (2022, December 14). India-China Border Dispute Explained in 400 Words. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-asia-53062484> [Accessed 20 June]
- Bloomfield, A. (2012). Time to Move On: Reconceptualizing the Strategic Culture Debate. *Contemporary Security Policy*, 33(3), 437–461.
- Chatterji, S. K. (2020, October 22). Wider connotations of Chinese “salami slicing.” *Asia Times*. <https://asiatimes.com/2020/10/wider-connotations-of-chinese-salami-slicing/> [Accessed 22 June 2024]
- Corr, A. (2018). *Grand Strategies: The New Game in the South China Sea*. Naval Institute Press.
- Feng, H. (2007). China’s Strategic Culture And War. In *Chinese Strategic Culture and Foreign Policy Decision-Making: Confucianism, Leadership, and War* (pp. 17-35). Routledge.
- Embassy of the People’s Republic China in the Republic of Indonesia. (2024). *China-Embassy.gov.cn*. http://id.china-embassy.gov.cn/eng/sgdt/202404/t20240404_11276553.html [Accessed 27 June 2024]
- Gray, K. (2021). *Why China’s Aggressive Strategy in the South China Sea Was a Mistake*. Canadian Forces College.
- Hawksley, H. (2018). *Asian Waters: The Struggle over the Indo-Pacific and the Challenge to American Power*. New York: The Overlook Press.
- Johnston, A. I. (1995). *Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History*. Princeton University Press.
- Lantis, J. (2002). Strategic Culture and National Security Policy. *International Studies Review*, 4(3), 87-113.
- Pandya, A. (2022, May 31). China’s Salami-Slicing- A Fine Tool of Oriental Statecraft. Usanas Foundation. <https://usanasfoundation.com/chinas-salami-slicing-a-fine-tool-of-oriental-statecraft> [Accessed 22 June 2024]
- Philip, S. A. (2020, September 22). China has more than doubled its military positions at LAC since Doklam, new report says. *ThePrint*. <https://theprint.in/defence/china-has-more-than-doubled-its-military->

- positions-at-lac-since-doklam-new-report-says/507938/ [Accesed 22 June 2024]
- Scobell, A. (2014). China's Real Strategic Culture: A Great Wall of the Imagination. *Contemporary Security Policy*, 35(2), 211–226.
- Scobell, A. (2002). *China and Strategic Culture*. Strategic Studies Institute, US Army War College.
- Snyder, J. L. (1977). *The Soviet Strategic Culture: Implication for Limited Nuclear Operations*. Santa Monica: Rand.
- Tirziu, Aleksandra Gadzala. (2023, August 8). Rising tensions along the Indian-Chinese border. GIS Reports. <https://www.gisreportsonline.com/r/china-india-border-2/>. [Accesed 29 June 2024]
- Wang, Y. (2011). Culture And Strategic Choice. In *Harmony and War: Confucian Culture and Chinese Power Politics* (pp. 11–33). Columbia University Press.
- Winston, R. & Sachdeva, I. (2020). *Raging Waters in the South China Sea: What the Battle for Supremacy Means for Southeast Asia*. Irvine: Lizard Publishing.
- Zhang, T. (2010). Chinese Strategic Culture: Traditional and Present Features. *Comparative Strategy*, 21(2), 73–90. <https://doi.org/10.1080/01495930290043056>